



Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/finetech>



Analisis Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

¹Nelis Umairoh, ²Nugraha, ³Raden Dian Hardiana

¹²³Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Correspondence: E-mail: nelisumairoh@upi.edu

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the DKI Jakarta provincial government for the 2018-2021 period when viewed from the independence ratio, degree of fiscal decentralization, effectiveness, regional financial efficiency, and non-financial when viewed from the economic growth rate (LPE), the open unemployment rate (TPT), and poverty. This research is a descriptive quantitative research with paired sample t-test. The results of this study indicate that there is a significant difference between before and during the Covid-19 pandemic in non-financial financial performance in terms of the declining economic growth rate, the open unemployment rate continues to grow, and so does the poverty rate. However, in the financial performance of the DKI Jakarta Provincial government, there is no significant difference between before and during the Covid-19 pandemic when viewed in terms of the independence ratio, degree of fiscal decentralization, effectiveness of PAD, and regional financial efficiency.

© 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 September 2023

First Revised 20 September 2023

Accepted 25 November 2023

First Available online 31 December 2023

Publication Date 31 December 2023

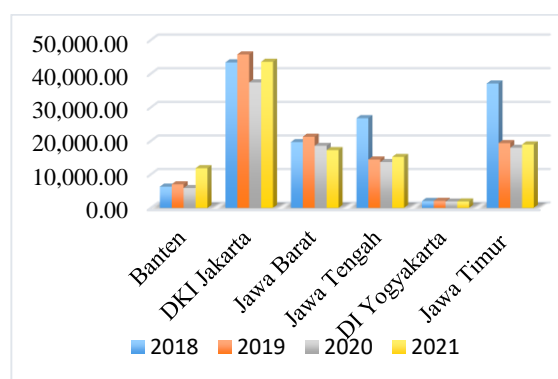
Keyword:

Regional Financial Performance, Regional Non-Financial Performance, Covid-19 Pandemic, Financial Independence, Degree of Fiscal Decentralization, Effectiveness of PAD, Financial Efficiency, LPE, TPT, Poverty

1. INTRODUCTION

Pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, termasuk Indonesia. Perihal tersebut disebabkan karena wabah yang melanda seluruh Indonesia, yaitu adanya *Coronavirus Disease*. Selama tahun 2020, pandemi ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 85 juta jiwa, sehingga menyebabkan krisis kesehatan dan kemanusiaan. Krisis kesehatan dan kemanusiaan ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi kontakatif yang merata di berbagai belahan dunia. Pandemi Covid-19 berdampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap Indonesia. Data menunjukkan penyebaran Covid-19 terus meningkat hingga akhir tahun, dengan catatan tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, Sisi Belanja Negara maupun sisi pembiayaan. Potensi Perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara. Tekanan pada sektor keuangan mempengaruhi APBN tahun Anggaran 2020, terutama dari sisi pembiayaan. Menurut Ahrens & Ferry (2020) ketahanan dan guncangan finansial menjadi perhatian utama di antara pemerintah daerah di mana sementara itu permintaan untuk banyak layanan terutama bidang kesehatan dan bantuan terhadap masyarakat telah meningkat efek yang diakibatkan oleh pandemi ini. Dalam konteks krisis pandemi Covid-19 di Indonesia berdebat tentang mana yang harus diutamakan kesehatan ataukah ekonomi yang dimana ekonomi sebagai sesuatu yang sangat sempit terutama dengan pendapatan asli daerah, dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber di mana pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Arfah, K.A., Risfaisal, R., & Pebrianti, 2021). Berikut adalah data pendapatan asli daerah provinsi di Pulau Jawa dan Bali:



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Gambar 1. 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pulau Jawa Tahun 2018-2021

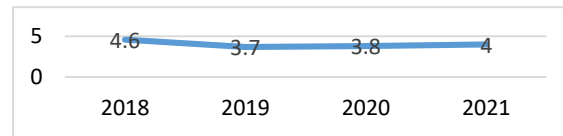
Berdasarkan gambar 1.1 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sehingga terdapat perbedaan antara pendapatan asli daerah pemerintah provinsi sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Sebelum adanya Covid-19, Pendapatan

daerah dalam APBD 2020 secara nasional tercatat mencapai Rp1.238,51 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp1.299,03 triliun. Akibat Covid-19, Pendapatan daerah diproyeksikan terkoreksi hingga Rp228,56 triliun menjadi Rp1.009,95 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) terpangkas Rp114,53 triliun akibat pelemahan ekonomi dan pembatasan aktivitas, sedangkan transfer ke daerah turun hingga Rp94,2 triliun karena adanya sebagian anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 secara terpusat. Untuk mengetahui apakah pengelolaan APBD telah dimanfaatkan dengan baik perlu dilakukan pengukuran sejauh mana kinerja APBD tersebut. Analisis kinerja keuangan berfungsi untuk mengukur kinerja yang telah terjadi agar memperoleh informasi keuangan yang mewakili entitas dan potensi kinerja (Lhutfi dkk., 2020). Dengan melihat data yang menunjukkan menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) saat pandemi Covid-19, maka kondisi sebenarnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami perbedaan pada sebelum dan saat pandemi Covid-19.

IMF juga memberikan prediksi ekonomi global akan menurun tajam dari perkiraan awal menjadi berada pada angka minus 3%. (Kemenkeu.go.id). Sebagai negara yang memiliki jumlah kasus Covid-19 yang cukup signifikan, Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 2,3% dari prediksi awal sebesar 5,04% (Lipi.go.id, 2020). Bahkan dalam skenario terburuk, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa berada diangka minus 0,4% (VOAIndonesia). Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,97% (*yeay on yeay*) yang terjadi pada kuartal I per tahun 2020. Jika dibandingkan dengan kuartal IV per tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Kinerja konsumsi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi rumah tangga dapat menopang lebih dari 50% produk domestik bruto.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018 sampai Tahun 2021 mengalami fluktuasi atau naik turun. Pada tahun 2018 Provinsi Banten yang memiliki TPT tertinggi diantara Provinsi lainnya yaitu 8,47, Tahun 2019 posisi tertinggi masih pada Provinsi Banten dengan 8,11. Tahun 2020 TPT tertinggi Provinsi DKI Jakarta yaitu 10,95 dan pada Tahun 2021 TPT tertinggi oleh Provinsi Jawa Barat 9,82%. Jika dilihat pada data tersebut terdapat penurunan TPT pada Tahun 2019 dan Tahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19, namun setelah pelaksanaan *new normal* diterapkan kegiatan perekonomian mulai berangsur-angsur membaik. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,05 juta orang atau 5,28 % dari jumlah angkatan kerja. *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal kedua 2020 akan bertambah 4,25 juta orang.

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mencatat bahwa pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap IPM Nasional. Pertumbuhan IPM yang rendah tentunya akan mempengaruhi menurunnya pengeluaran per kapita. Hal ini sejalan dengan lemahnya perekonomian yang disebabkan oleh pembatasan social berskala besar sehingga melemahnya perekonomian. Ketika perekonomian Indonesia mengalami resesi akibat dampak pandemi Covid-19. Berikut adalah data tingkat kemiskinan nasional:



Sumber: www.bps.go.id

Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2018-2021

Jika dilihat pada data diatas Tingkat Kemiskinan Nasional mengalami penurunan yang terjadi pada tahun 2019 menjadi 3,7 dan tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 3,8, lalu disusul tahun selanjutnya 2021 menjadi 4. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan signifikan terjadi pada tahun 2019 saat puncaknya pandemi Covid-19.

2. METHODS

Desain Penelitian

Rancangan atau Desain penelitian diartikan sebagai strategi pengaturan konteks penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh data yang valid berdasarkan variable dan tujuan penelitian (Arifah, 2018:177). Dalam merancang sebuah penelitian, desain dimulai dengan mengadakan penyelidikan dan evaluasi terhadap penelitian terdahulu. Desain penelitian yang digunakan harus dijelaskan secara rinci dan jelas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif.

Operasionalisasi Variabel

Menurut Moh, Nazir (2014:110) Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable atau konstruk dengan cara memberikan arti atau spesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variable tersebut. Variable yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Saragih & Siregar (2020:46) Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Halim (2002:176) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Derajat Desentralisasi Fiskal

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas

Menurut Fathah (2017:33) Rasio efektivitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus untuk Rasio Efektivitas adalah:

Rasio Efektivitas

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi

Menurut Fathah (2017:33) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah maka semakin baik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat biaya untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah: *Rasio Efisiensi* Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bukan di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK) dihitung dengan menggunakan *Head Count Index* (HCI-P0) sebagai berikut:

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (2015) pengangguran merupakan penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan,

mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai bekerja dan tidak mencari pekerjaan dengan alasan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Berikut ini adalah perhitungan tingkat pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam suatu daerah dengan satuan persen:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

7. Kemiskinan

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK) dihitung dengan menggunakan *Head Count Index* (HCI-PO) sebagai berikut:

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi. Adapun pengambilan sampel yaitu berupa sapling jenuh dimana semua populasi bagian dari sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa APBD, Laporan Realisasi APBD yang diperoleh oleh situs resmi direktorat jendral perimbangan keuangan kementerian keuangan melalui *website* www.djpk.kemenkeu.go.id serta Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Kemiskinan melalui laman www.bps.go.id.

Teknik Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan variabel terikat yang diukur melalui rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan. Sedangkan analisis inferensial pada penelitian ini untuk mengetahui uji beda antara sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19 menggunakan alat uji *Paired Sample T-Test*.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Pada penelitian ini dilakukan analisis kinerja keuangan dan non keuangan pada provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan alat uji beda *Paired Sample T-test* sebagai uji perbandingan apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan dan non keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemic Covid-19.

1. Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil uji *paired sample t-test* pada rasio kemandirian menghasilkan nilai t-hitung sebesar 0,020 dan derajat kebebasan (df) sebesar 1. Kriteria pada penelitian ini adalah membandingkan nilai sig. (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nilai Sig.(2-tailed) pada rasio kemandirian sebesar 0,987 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka keputusannya adalah menerima H_0 dan menolak H_1 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio kemandirian pada kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Pada sebelum dan saat pandemi Covid-19 Provinsi DKI Jakarta sudah memaksimalkan PAD dengan alokasi PAD sebesar 179% dibandingkan pendapatan transfer. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak terjadinya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini tidak mempengaruhi kemampuan kemampuan pemerintah daerah dalam mengupayakan potensi daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Dalam kinerja kemandirian keuangan pemerintah daerah terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dimana terdapat kecenderungan daerah lebih mengandalkan penerimaan dana transfer daripada memaksimalkan penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kepentingan pembiayaan daerah menunjukkan bahwa tingkat kinerja keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh dana transfer. Dana transfer dalam hal ini menunjukkan semakin sedikit dana transfer yang diberikan kepada suatu daerah maka akan semakin sedikit ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Aryani, 2022) bahwa selama pandemi Covid-19 kemandirian pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak terganggu. Selama pandemi Covid-19 Provinsi DKI Jakarta tetap mandiri dalam penanganan Covid-19. Didukung dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam melakukan upaya bagaimana pendapatan atau penerimaan daerah khususnya pajak daerah tidak mengalami penurunan secara drastis dan signifikan (Haqiqi et al., 2020). Penelitian menurut Inasito & Rosdiana (2021) berbagai upaya yang dilakukan DKI Jakarta sebagai ibukota negara dalam menekan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel dan pajak restoran dengan mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak, seperti :

1. Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah karena pelanggaran administrasi perpajakan seperti keterlambatan pembayaran pokok pajak, keterlambatan pelaporan pajak, denda dan lain sebagainya.
2. Tidak ada kenaikan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada 2022 atau disamakan dengan PBB-P2 pada 2019. Selain itu, juga dilakukan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran tunggakan tahun-tahun sebelumnya, terhitung 3 April-29 Mei 2020.
3. Pengurangan pokok pajak daerah, khususnya kepada pelaku usaha yang terkena dampak atas pelaksanaan PSBB. Pengurangan ini dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Pajak kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB).

Kebijakan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai kota yang memiliki pemasukan pajak hotel dan restoran sangat besar, akan tetapi pada masa PSBB pendapatan tersebut menurun dan tidak akan mencapai target, sehingga upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta menanggulangi hal tersebut adalah memebrikan keringanan dalam pembayaran pajak daerah, untuk pajak restoran dan pajak daerah adalah 50% dan bagi tempat usaha yang tutup sementara untuk jangka waktu tertentu selama masa PSBB dan pandemi ini adalah 0% dengan membuat surat pernyataan yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh Bapenda Kota DKI Jakarta . Hal ini didukung dengan dibuktikan pada penelitin yang dilakukan oleh Marvianto (2021) tentang kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19 bahwa rata-rata persentase efektifitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 sebesar 98,36%, dimana angka ini diseimbangi dengan penurunan target penerimaan pajak daerah DKI Jakarta yang sudah ditetapkan. Serta pada penelitian Rahmawati & Kiswara (2022) bahwa Provinsi di Indonesia sebelum dan selama pandemi Covid-19 ditemukan tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio kemandirian keuangan daerah.

2. Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2,271 dan derajat kebebasan (df) sebesar 1. Kriteria pada penelitian ini adalah membandingkan nilai sig. (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nilai Sig.(2-tailed) pada rasio kemandirian sebesar 0,264 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka keputusannya adalah menerima H_0 dan menolak H_1 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio derajat desentralisasi fiskal pada kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Kemampuan daerah Provinsi DKI Jakarta sudah sangat baik dalam membiayai kegiatan pemerintahannya baik sebelum dan saat pandemi Covid-19 dengan rata-rata 69%. Dengan adanya fenomena pandemi Covid-19 ini tidak berdampak signifikan pada pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provisi DKI Jakarta. Artinya Provinsi DKI Jakarta memiliki total pendapatan daerah sudah didominasi dari pendapatan asli daerah dari pada pendapatan transfer. Penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta sebgain besar bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah mencapai 84,67%. Pada penerimaan pajak daerah tw II tahun 2021 meeningkat sebesar 4,34% dari tahun sebelumnya. Tren capaian pajak daerah Provinsi DKI Jakarta periode tw II dari tahun 2018 sampai denga 2019 mengalami peningkatan, namun tahun 2020 turun signifikan akibat pandemi Covid-19 dan kembali naik di tahun 2021. Tren peningkatan capaian pajak daerah tersebut tidak sebanding dengan tren *tax ratio* yang mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Hal ini menunjukkan meskipun capaian pajak daerah cenderung meningkat pada setiap tahun, namun masih belum berpengaruh besar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta.

Secara teori, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2019). Pemerintah provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat desentralisasi berada pada kategori yang baik. Yang berarti sudah tidak didominasi bantuan dari pusat dalam membiayai penyelenggaraan desentralisasi. Artinya, pemerintah daerah dinilai cukup baik dalam penyelenggaraan desentralisasi di mana dapat dilihat dari kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah. PAD yang dihasilkan daerah, diharapkan mampu membiayai proses desentralisasi yang dapat mempercepat pembangunan daerah.

Hasil pada penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Kiswara (2022) bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat derajat desentralisasi fiskal sebelum dan selama pandemi Covid-19. Selain itu, di daerah Minahasa menerangkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal juga tidak berdampak signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Onibala et al., 2021).

3. Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 dilihat dari Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* menghasilkan nilai t-hitung sebesar 1,914 dan derajat kebebasan (df) sebesar 1. Kriteria pada penelitian ini adalah membandingkan nilai sig. (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nilai Sig.(2-tailed) pada rasio kemandirian sebesar 0,307 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka keputusannya adalah menerima H_0 dan menolak H_1 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio efektivitas PAD pada kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Rasio efektivitas keuangan daerah pada Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari kriteria sebelum pandemi Covid-19 cukup efektif dengan trend efektivitas lebih dari 90%. Namun pada periode 2020 trend efektivitas menjadi tidak efektif sebesar 65%. Realisasi PAD Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 45,73% pada triwulan II tahun 2020. Pada provinsi DKI Jakarta terdapat empat jenis pendapatan yang menjadi komponen PAD diantaranya pajak daerah yang merupakan penyumbang realisasi terbesar, sementara penyumbang kedua terbesar adalah lain-lain pendapatan asli daerah dan sisanya merupakan realisasi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta retribusi daerah.

Hasil hipotesis pada rasio efektivitas PAD menolak bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan. Pandemi Covid-19 membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kesulitan dalam merealisasikan penerimaan PAD agar dapat memenuhi target pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan wajib pajak kepada daerah menurun karena pandemi Covid-19. Artinya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD berkurang.

Pemberlakuan APBD Provinsi DKI tahun 2021 disesuaikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih terdampak pandemi Covid-19. Secara keseluruhan Postur APBD Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Realisasi PAD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2021 sampai dengan triwulan I mencapai 11,85% dari yang ditargetkan. Penyumbang realisasi PAD dengan 83,46% adalah pajak daerah, selanjutnya adalah lain-lain PAD sebesar 14,25% dan sisanya sebesar 2,29%. Secara

persentase, penurunan realisasi PAD tertinggi terdapat pada komponen retribusi daerah sebesar -50,06% dari tahun 2020.

Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas PAD, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2022) bahwa Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan efektivitas pada saat Pandemi Covid-19 menjadi kurang efektif namun penurunan ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Adanya penurunan potensi perekonomian yang membuat penerimaan PAD tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai penelitian di atas, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat pandemi Covid-19 belum menjalankan roda pemerintahannya secara efektif dikarenakan rata-rata saat pandemi Covid-19 kurang dari 75%. Hal demikian terjadi karena realisasi PAD belum mencapai target pendapatan daerah itu sendiri.

4. Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 dilihat dari Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* menghasilkan nilai t-hitung sebesar 4,766 dan derajat kebebasan (df) sebesar 1. Kriteria pada penelitian ini adalah membandingkan nilai sig. (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nilai Sig.(2-tailed) pada rasio kemandirian sebesar 0,132 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka keputusannya adalah menerima H_0 dan menolak H_1 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio efisiensi pada kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan di Kota Batu, Malang bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah tergolong stabil (Puspita & Pangastuti, 2022). Terjadinya penurunan penerimaan PAD dan perubahan alokasi dana perimbangan akibat pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan total pendapatan daerah. Pada tahun 2020 selain pendapatan daerah, belanja daerah juga mengalami penurunan. Pada belanja daerah penyumbang belanja daerah tertinggi adalah belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Sampai akhir tw II tahun 2021 realisasi belanja daerah meningkat 9,47% dibanding tahun 2020. Peningkatan realisasi ini disebabkan peningkatan signifikan belanja bantuan sosial sebesar 110,155 dan belanja pegawai sebesar 18,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara realisasi komponen belanja daerah yang lain mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penopang realisasi belanja bantuan sosial berasal dari Kementerian Sosial dengan realisasi program sembako dan realisasi program keluarga harapan. Sedangkan pelayanan kesehatan dan JKN Kementerian Kesehatan berkontribusi 5,59% dari total realisasi belanja bantuan sosial. Dengan adanya pandemi Covid-19 maka berdampak pada masalah kesehatan, sosial, dan meningkatkan kemiskinan, sehingga pemerintah memberikan prioritas mengalokasikan anggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2021.

Jika dilihat pada hasil efisiensi Provinsi DKI Jakarta mempunyai rata-rata kriteria kurang efisien yang menandakan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta belum kurang dapat menekan atau mengefisienkan jumlah belanja daerahnya yang melebihi pendapatan daerahnya.

5. Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* menghasilkan nilai t-hitung sebesar 17,873 dan derajat kebebasan (df) sebesar 5. Kriteria pada penelitian ini adalah membandingkan nilai sig. (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nilai Sig.(2-tailed) pada rasio kemandirian sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka keputusannya adalah menerima H_1 dan menolak H_0 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan laju pertumbuhan ekonomi pada kinerja non keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Pada hasil penelitian untuk laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan hipotesis diterima atau terdapat perbedaan yang signifikan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indayani & Hartono (2020) pertumbuhan ekonomi mengalami kelambatan yang menjadi dampak dari adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Sedangkan pada Provinsi Banten juga cukup dalam terkontraksi karena pada masa Pandemi Covid-19 sektor industri pengolahan belum dapat berjalan secara optimal (Widiastuti & Silfiana, 2021). Laju pertumbuhan ekonomi juga memiliki hubungan negatif dengan jumlah pengangguran bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka memberikan peluang kerja baru ataupun kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran. Sedangkan pada penelitian ini laju pertumbuhan ekonomi saat pandemi Covid-19 mengalami penurunan sehingga mengakibatkan peluang kerja semakin sedikit atau menurun.

Selanjutnya perlu upaya dari pemerintah daerah untuk menumbuhkan perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya dengan program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara masif. Pemerintah menyediakan anggaran vaksinasi Covid-19 nasional gratis sebesar Rp 54,44 triliun yang merupakan hasil pengesahan atau realokasi APBN. Program vaksinasi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, dan dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

6. Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* menghasilkan nilai t-hitung sebesar 6,293 dan derajat kebebasan (df) sebesar 5. Kriteria pada penelitian ini adalah membandingkan nilai sig. (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nilai Sig.(2-tailed) pada rasio kemandirian sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka keputusannya adalah menerima H_1 dan menolak H_0 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengangguran terbuka pada kinerja non keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Tingkat pengangguran terbuka selama pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan yang dibuktikan pada hasil hipotesis bahwa hipotesis diterima dimana terdapat perbedaan yang signifikan. Data Kementerian Tenaga Kerja bahwa terdapat 212.394 pekerja dari sektor formal terkena PHK, dan pekerja formal yang dirumahkan sejumlah 1.205.191 orang. Dari data tersebut, menjelaskan bahwa akibat pandemi Covid-19 ada beberapa sektor usaha melakukan PHK terhadap pekerjanya. Para karyawan dan pegawai banyak yang kehilangan

pekerjaan mereka di tengah kelambatan ekonomi saat pandemi. TPT juga selaras dengan kondisi pertumbuhan ekonomi apabila pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, maka dapat berpengaruh terhadap jumlah pengangguran yang mengalami penurunan.

Adapun berdasarkan struktur ekonomi tempat penduduk bekerja di Jakarta pada Februari 2021, menurut data BPS adalah paling banyak diserap oleh sektor perdagangan (24,46%), sektor industri pengolahan (13,44%), sektor transportasi dan pergudangan (11,40%), dan sektor akomodasi dan makan minum (10,87%), sisanya bekerja di sektor perekonomian lainnya hingga 39,83%. Walaupun TPT sudah membaik, namun demikian, TPT belum kembali ke angka semula sebelum adanya COVID-19 yakni 5,15% pada Februari 2020 lalu. Hal tersebut mensyaratkan efektivitas berbagai kebijakan di masa pandemi COVID-19 sehingga TPT bisa terus tertekan sampai dengan persentase yang minimal. Perekonomian lainnya hingga 39,83% diserap oleh sektor perdagangan (24,46%), sektor industri pengolahan (13,44%), sektor transportasi dan pergudangan (11,40%), dan sektor akomodasi dan makan minum (10,87%)., sisanya bekerja di sektor perekonomian lainnya hingga 39,83%.

Penelitian ini selaras dengan penelitian pada Provinsi Sumatera Selatan bahwa terus terjadi peningkatan persentase tingkat pengangguran terbuka dan pandemi Covid-19 berpengaruh positif terhadap peningkatan pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan (Khoirudin, 2021). Pada temuan menyatakan bahwa saat terjadi pandemi Covid-19 angka TPT secara nasional lebih tinggi dibandingkan saat sebelum pandemi Covid-19 serta TPT lebih tinggi berada pada daerah dengan laju pertumbuhan PDRB di bawah angka nasional yang sejalan dengan penelitian Indayani & Hartono (2020) menyatakan bahwa terdapat pelambatan pertumbuhan ekonomi saat wabah Covid-19 dan pengangguran akan mengalami lonjakan akibat terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Perlambatan pertumbuhan ekonomu bisa disebut juga penurunan laju PDRB, maka bisa dikatakan bahwa saat pandemi Covid-19 terdapat banyak daerah dengan laju pertumbuhan PDRB rendah akan memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi (Putri et al., 2021).

7. Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 dilihat dari Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* menghasilkan nilai t-hitung sebesar 4,180 dan derajat kebebasan (df) sebesar 5. Kriteria pada penelitian ini adalah membandingkan nilai sig. (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nilai Sig.(2-tailed) pada rasio kemandirian sebesar 0,009 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka keputusannya adalah menerima H_1 dan menolak H_0 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengangguran terbuka pada kinerja non keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemiskinan sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Administrasi dengan kontraksi tingkat kemiskinan yang cukup dalam. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin pada sebagian besar Provinsi di Indonesia Data BPS menyebutkan bahwa Juni 2020, sekitar 22 dari 34 provinsi sudah terdampak (Herman, 2020). Dampak terbesar dan signifikan terjadi pada wilayah Jawa dan Bali yaitu berturut-turut Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Banten (Tarigan et al., 2020). Pandemi Covid-19 berdampak pada kedalaman dan keparahan kemiskinan di mana ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK semakin tinggi yang berarti semakin jauh GK. Penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin semakin timpang. Dampak pandemi bersifat global, tetapi berdampak lebih besar terjadi pada masyarakat miskin, dan ini telah memperlebar terjadinya kesenjangan.

Untuk itu, usaha pemerintah perlu lebih diarahkan kepada pengentasan kemiskinan yang mampu mengangkat penduduk miskin keluar dari garis kemiskinan seperti berbagai bantuan sosial yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang berkontribusi menjaga stabilitas konsumsi masyarakat miskin dan hampir miskin. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah pada tahun 2020 meningkatkan besaran maupun jenis perlindungan sosial sebagai jaringan pengaman dalam menjaga tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bantuan yang dialokasikan pada tahun 2021 ini akan dapat membantu masyarakat dalam kelompok miskin dan rentan untuk bertahan dari dampak pandemi COVID-19 serta membantu pemulihan kondisi perekonomian secara umum.

4. CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai kinerja keuangan dan non keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Jika dilihat secara keseluruhan tingkat kemandirian keuangan Provinsi DKI Jakarta sudah tergolong mandiri dengan pola hubungan delegatif yaitu termasuk tinggi.
2. Tingkat desentralisasi fiskal pada Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Jika dilihat secara keseluruhan tingkat derajat desentralisasi fiskal Provinsi DKI Jakarta sudah tergolong sangat baik.
3. Tingkat efektivitas PAD pada Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Jika dilihat secara keseluruhan pengelolaan PAD sebelum pandemi Covid-19 sudah cukup efektif namun setelah adanya pandemi Covid-19 terjadi penurunan menjadi kurang efektif.
4. Tingkat efisiensi keuangan daerah pada Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Jika dilihat secara keseluruhan tingkat efisiensi Provinsi DKI Jakarta baik sebelum dan pada saat pandemi masih tergolong kurang efisien.
5. Laju pertumbuhan ekonomi pada Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 mengalami perbedaan yang signifikan. Jika dilihat secara keseluruhan LPE Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,37% hingga menyentruh minus pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan wilayah Jakarta Utara.

6. Tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 mengalami perbedaan yang signifikan. Jika dilihat secara keseluruhan TPT Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,5%.
7. Tingkat kemiskinan pada Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 mengalami perbedaan yang signifikan. Jika dilihat secara keseluruhan kemiskinan Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,5%.

Bagi peneliti selanjutnya dapat lebih mendetail mengenai analisis akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga bisa ditemukan hasil penelitian yang lebih spesifik. Serta keterbatasan peneliti ketika menjalankan penelitian ini yaitu tidak adanya *variable control* dikarenakan peneliti menggunakan *uji paired sample t-test* yang mengakibatkan hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh aspek lain yang diteliti.

6. REFERENCES

- Arfah, K.A., Risfaisal, R., & Pebrianti, F. (2021). Peran Pendapatan Daerah Terhadap Pasar Cakke Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasis Kec. Anggeraja Kab. Enrekang). *Jurnal Pendidikan*, 208–214.
- Arifah, N. (2018). *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Araska.
- Aryani, H. F. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 147–156.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Revisi)*. Salemba Empat.
- Haqiqi, M., Normawati, R., & Islami, N. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Di Tengah Pandemi Covid-19 Berbasis Public Policy Evaluation. *SCIENTIFIC PAPER ACADEMY (SPA) UKM-F DYCREs*.
- Inasito, D. O., & Rosdiana, H. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Tengah Pandemi Covid-19. 3(12), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i12.16622684-883X>
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201–208.
- Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2020). Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress? *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(1), 1-11.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Marvianto, B. (2021). Analisis Kontrobusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Sebelum Pandemi Covid-19. *Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia*.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian (Cetakan Ke)*. Ghalia Indonesia.

- Onibala, A., Oldy, R. T., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.
- Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. 15(1), 90–104.
- Putri, A., Azzahra, A., Andiany, D. D., Abdurrohman, D., Sinaga, P. P., & Yuhan, R. J. (2021). Perbandingan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 25. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i2.11592>
- Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022). DAMPAK COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). 11, 1–8. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33887>
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 1–14.
- Tarigan, H., Sinaga, J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap kemiskinan di indonesia. 3, 457–479.
- VOA Indonesia. (n.d.). Menkeu: Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 bisa Minus 0,4 persen. VOA Indonesia. (Diakses, 25 Februari 2020) dari <https://www.voaindonesia.com/a/menkeudampak-Covid-19-pertumbuhanekonomiindonesia2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.htm>
- Widiastuti, A., & Silfiana. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa. 9(1), 44–61.